Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 10 No 5 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

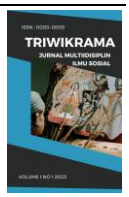

SOSIALISME DAN DEMOKRASI DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TERHADAP IDEOLOGI DAN IMPLEMENTASINYA

Alexander Josan Murtanto[1], Bintang Shaquelle Wardhana[2], Bunga Aurelia[3], Wisnu Utomo[4], Nabila Eydenia[5]

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12450

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2025
Revised Juli 2025
Accepted Juli 2025
Available online Juli 2025

Email:
2410413178@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410413171@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410413186@mahasiswa.upnvj.ac.id,
wisnu_utomo@yahoo.co.id,
2410413172@mahasiswa.upnvj.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ideologi sosialisme dimaknai, diimplementasikan, dan berinteraksi dengan sistem demokrasi Indonesia dalam konteks politik, kebijakan publik, serta upaya mewujudkan keadilan sosial di tengah tantangan liberalisasi dan dominasi oligarki. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan teori sosialisme Karl Marx, teori Demokrasi Pancasila, teori hibridisasi ideologi, serta teori globalisasi dan modernisasi sebagai landasan analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan akademisi serta aktivis politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisme di Indonesia tidak dijalankan secara revolusioner seperti dalam teori Marx, melainkan mengalami proses adaptasi melalui nilai-nilai lokal seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kekeluargaan yang terwujud dalam Demokrasi Pancasila. Konsep Marhaenisme dan gagasan "Sosialisme Indonesia" dari Soekarno merupakan contoh konkret dari hibridisasi ideologi yang menjadikan sosialisme lebih kontekstual dengan karakter bangsa. Namun demikian, dominasi oligarki, liberalisasi ekonomi, dan politik transaksional telah memperlemah peran negara dalam menjalankan prinsip keadilan sosial secara substantif. Kesimpulannya, sosialisme di Indonesia telah berkembang menjadi instrumen moral dan etika dalam demokrasi, namun masih menghadapi tantangan serius akibat struktur ekonomi-politik yang timpang. Penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai sosialisme melalui kontekstualisasi budaya, pendidikan politik rakyat, dan reformasi institusional agar Demokrasi Pancasila mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang sejati. Temuan ini memberi kontribusi dalam pengembangan studi ideologi pascakolonial dan membuka peluang refleksi terhadap relevansi sosialisme sebagai alternatif etis dalam tata kelola demokrasi modern di Indonesia.

Kata kunci: Sosialisme; Demokrasi Pancasila; keadilan sosial; hibridisasi ideologi; Indonesia

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman ideologi politik dan telah melalui perjalanan panjang dalam membentuk sistem demokrasi. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, bangsa ini menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan perpaduan antara sosialisme, nasionalisme, dan nilai-nilai keagamaan. Pancasila dimaksudkan sebagai fondasi demokrasi yang mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, perkembangan demokrasi di Indonesia kerap kali dipengaruhi oleh tarik ulur ideologi dari berbagai arah, baik dari kiri seperti sosialisme maupun dari kanan seperti kapitalisme dan konservatisme religius (Zaman et al., 2018).

Sosialisme pernah menjadi narasi politik yang cukup dominan pada era 1950-an dan diadopsi oleh berbagai partai di Indonesia. Namun, implementasinya lebih sering bersifat retoris tanpa kebijakan nyata yang mendorong redistribusi kekayaan atau kepemilikan kolektif secara menyeluruh (Fogg, 2020). Presiden Soekarno mencetuskan gagasan

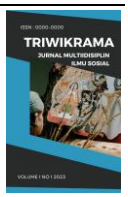

"Sosialisme Indonesia" sebagai simbol nasionalisme dan upaya menjauhkan diri dari pengaruh blok Barat maupun Timur. Namun, setelah peristiwa 1965, istilah sosialisme menjadi sangat sensitif karena diidentikkan dengan komunisme yang kemudian dilarang secara resmi hingga kini.

Reformasi tahun 1998 menandai transformasi penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Munculnya sistem multipartai, pemilihan langsung, dan kebebasan media menjadi indikator tumbuhnya demokrasi. Meskipun begitu, arah demokrasi saat ini cenderung mengarah pada liberalisasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila (Samosir, 2021). Politik yang bersifat transaksional, ketimpangan ekonomi, serta pengaruh oligarki masih menjadi hambatan utama bagi terciptanya demokrasi yang benar-benar adil dan substantif.

Salah satu persoalan penting dalam kajian ini adalah bagaimana nilai-nilai sosialisme seperti keadilan ekonomi dan perlindungan bagi kelompok rentan dapat terintegrasi dalam sistem demokrasi Indonesia yang semakin terliberalisasi. Studi mengenai Partai Sosialis Indonesia (PSI) misalnya, menunjukkan bahwa perjuangan sosial-demokrat yang damai dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat belum mendapat tempat yang kuat dalam lanskap politik karena kurangnya dukungan budaya dan keagamaan terhadap gagasan mereka (Sukri, 2021)

Kajian ini penting dilakukan untuk menjawab keterbatasan dalam pemahaman tentang bagaimana sosialisme dimaknai dan dijalankan dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini. Kebanyakan penelitian yang ada hanya mengangkat dimensi normatif atau sejarah, tanpa menggali pengalaman nyata para aktor politik, pandangan masyarakat, serta narasi tentang praktik sosialisme dalam ruang demokrasi kontemporer (Daud, 2016).

Mayoritas kajian sebelumnya belum secara menyeluruh menggunakan data lapangan untuk memperlihatkan dinamika sosialisme sebagai kekuatan ideologis yang sah dalam demokrasi Indonesia modern. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Fogg (2020) dan Fakih (2015) masih berkutat pada pendekatan deskriptif historis dan belum menyentuh interaksi aktual antara prinsip sosialisme dengan praktik institusi demokrasi saat ini (Fakih, 2015).

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya melengkapi kekosongan yang ada dengan menggali pengalaman para elite politik, organisasi masyarakat sipil, serta kebijakan publik yang berkaitan dengan nilai-nilai sosialisme. Selain itu, data kuantitatif seperti ketimpangan pendapatan, distribusi aset, serta akses layanan publik akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip sosialisme tercermin dalam praktik demokrasi Indonesia masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis peran sosialisme dalam sistem demokrasi Indonesia serta dampaknya terhadap kebijakan publik dan keadilan sosial. Secara teoritis, kajian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan studi ideologi dan demokrasi di negara-negara pascakolonial. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan kebijakan bagi upaya membangun demokrasi yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ideologi sosialisme dimaknai, diimplementasikan, dan berinteraksi dengan sistem demokrasi Indonesia dalam konteks politik, kebijakan publik, serta upaya mewujudkan keadilan sosial di tengah tantangan liberalisasi dan dominasi oligarki?

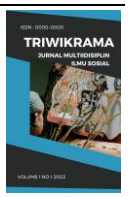

c. Kerangka Teori

1. Teori Sosialisme oleh Karl Marx

Teori sosialisme Marx mengatakan bahwa keadilan sosial hanya dapat dicapai melalui penghapusan kelas-kelas sosial melalui perjuangan atau revolusi kelas. Marx yakin bahwa dengan menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menggantikannya dengan kepemilikan bersama, masyarakat dapat mencapai keadilan dan menghilangkan eksploitasi. Sistem sosialisme ini dianggap sebagai tahap transisi menuju masyarakat komunis, di mana tidak ada lagi kelas, negara, maupun kepemilikan pribadi-semua kebutuhan masyarakat dipenuhi secara kolektif. (Hendriwani, 2020). Ringkasnya, teori sosialisme menurut Marx adalah upaya mewujudkan masyarakat tanpa kelas dengan menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menggantinya dengan kepemilikan bersama, melalui perjuangan kelas yang pada akhirnya akan menghapuskan eksploitasi dan ketidakadilan sosial. (Hendriwani, 2020)

Hasil Analisis :

Teori sosialisme Karl Marx, yang menekankan penghapusan kelas sosial dan kepemilikan pribadi atas alat produksi untuk mencapai keadilan sosial, sempat mempengaruhi pemikiran politik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Namun, implementasi ideologi ini tidak pernah sepenuhnya terwujud karena Indonesia lebih memilih sistem demokrasi Pancasila yang menekankan harmoni sosial, bukan perjuangan kelas. Sosialisme di Indonesia lebih dilihat sebagai inspirasi moral dalam kebijakan publik, seperti program kesejahteraan, daripada sebagai sistem ekonomi-politik yang dominan. Selain itu, stigma terhadap sosialisme pasca-1965 membatasi ruang bagi ideologi ini untuk berkembang, sementara demokrasi Indonesia berjalan dalam kerangka pasar bebas dengan intervensi negara yang terbatas, jauh dari cita-cita Marxis tentang revolusi kelas dan penghapusan eksploitasi struktural.

2. Teori Demokrasi

Berdasarkan *Kajian Akademik: Penegasan Demokrasi Pancasila* (Badan Pengkajian MPR RI, 2018), Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai kebangsaan seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Sistem ini tidak sepenuhnya mengikuti model demokrasi liberal atau sosialisme otoriter, melainkan membentuk sintesis ideologis yang menempatkan kedaulatan rakyat dalam bingkai kolektivitas dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam konteks penelitian "Sosialisme dan Demokrasi di Indonesia", teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai sosialisme diterapkan melalui sistem demokrasi khas Indonesia. Demokrasi Pancasila mencerminkan perpaduan antara partisipasi politik rakyat dan peran aktif negara dalam menciptakan keadilan sosial, menjadikannya kerangka ideal untuk mengkaji implementasi ideologi dalam praktik berbangsa dan bernegara.

3. Teori Hibridisasi Ideologi

Dalam buku *Poskolonial: Hibriditas (Teori dan Praktik)* karya Iqbal Hilal, Muharsyam Dwi Anantama, dan Munaris (2023), dijelaskan bahwa teori hibriditas dalam kajian poskolonial menggambarkan percampuran antara budaya kolonial dan lokal yang menghasilkan identitas baru yang kompleks. Hibriditas ini tidak hanya terjadi dalam bentuk budaya, tetapi juga dalam struktur ideologi dan sistem politik yang terbentuk pascakolonialisme. Terkait dengan judul studi "Sosialisme dan

Demokrasi di Indonesia", teori ini relevan untuk memahami bagaimana ideologi asing seperti sosialisme dan demokrasi mengalami transformasi saat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Sistem Demokrasi Pancasila, misalnya, dapat dilihat sebagai hasil dari proses hibridisasi antara nilai-nilai Barat dan lokal yang menghasilkan sistem pemerintahan khas Indonesia. Teori ini memberikan kerangka kritis untuk menganalisis pembentukan identitas politik nasional yang tidak sepenuhnya meniru model luar, tetapi dibentuk oleh negosiasi historis dan budaya.

4. Teori Globalisasi dan Modernisasi

Teori Globalisasi, Menurut David Held dan Anthony McGrew dalam Global Transformations: Politics, Economics, and Culture, globalisasi menciptakan interkoneksi lintas negara yang memengaruhi kedaulatan nasional dan ideologi lokal. Proses ini menantang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global sambil mempertahankan identitas politiknya.

Teori Modernisasi, Teori ini menyoroti transformasi struktural yang diperlukan agar negara berkembang dapat beradaptasi dengan tuntutan global. Proses modernisasi mencakup perubahan dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial untuk mencapai kemajuan yang sejalan dengan perkembangan global.

Relevansi dalam Konteks Indonesia:

- Adaptasi Sosialisme: Indonesia menghadapi tantangan dalam mengadopsi nilai-nilai sosialisme di tengah tekanan globalisasi yang mendorong liberalisasi ekonomi dan individualisme.
- Demokrasi dan Identitas Politik: Dalam era globalisasi, Indonesia berupaya mempertahankan sistem demokrasi yang inklusif sambil menghadapi pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi kebijakan domestik dan identitas nasional.
- Tantangan dan Peluang: Globalisasi menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya, namun juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan sosial dan erosi nilai-nilai lokal.
-

D. Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara sosialisme dan demokrasi di Indonesia dengan menelaah bagaimana ideologi sosialisme dipahami dan diimplementasikan dalam konteks politik nasional. Objek kajian ini menarik karena menunjukkan dinamika antara gagasan kolektivisme dan sistem demokrasi yang pluralistik, yang kerap dianggap bertentangan namun justru berkembang berdampingan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2013), yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui perspektif partisipan dan konteks kulturalnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan akademisi dan aktivis politik yang relevan dengan tema sosialisme, sesuai dengan anjuran Moleong (2017) bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menangkap pola ideologis dan praktik sosialisme dalam kerangka demokrasi Indonesia.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 10 No 5 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

E. Pembahasan

Penelitian ini menyoroti bagaimana ideologi sosialisme di Indonesia tidak hanya menjadi warisan historis, tetapi juga mengalami proses transformasi dan adaptasi yang kompleks dalam konteks demokrasi Pancasila yang khas Indonesia. Studi kasus Partai Sosialis Indonesia (PSI), Parsi, dan Paras memberikan gambaran konkret tentang bagaimana sosialisme dipahami, diimplementasikan, dan berinteraksi dengan sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai lokal. Menurut Sapta Dwi Cahyo (2016), sosialisme di Indonesia tidak mengadopsi sosialisme revolusioner secara murni, melainkan mengalami proses adaptasi yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa sosialisme di Indonesia bukanlah ideologi yang bersifat dogmatis atau kaku, melainkan ideologi yang fleksibel dan kontekstual. PSI dan pendahulunya (Parsi dan Paras) memperjuangkan sosialisme demokrat yang moderat dan konstitusional, yang berupaya mengharmonisasikan cita-cita sosialisme dengan praktik demokrasi parlementer. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sosialisme di Indonesia berfungsi sebagai nilai moral dan prinsip keadilan sosial yang diinternalisasi dalam sistem demokrasi, bukan sebagai agenda revolusioner yang mengedepankan konflik kelas. Dengan begitu, sosialisme di Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan kesejahteraan bersama dan penguatan peran negara dalam mengatur ekonomi, yang sejalan dengan sila kelima Pancasila. Tholib Khalik (2013) menegaskan bahwa sosialisme ala Soekarno yang juga memengaruhi PSI merupakan hasil hibridisasi antara sosialisme internasional dengan nilai-nilai lokal Indonesia, terutama melalui konsep Marhaenisme. Marhaenisme menempatkan sosialisme sebagai perjuangan untuk membela kaum tani dan buruh yang tertindas, sekaligus mengintegrasikan nilai kebangsaan dan budaya Indonesia. Hal ini menandai sebuah transformasi ideologis penting, di mana sosialisme tidak lagi dipandang sebagai ideologi asing yang diterapkan secara mekanis, tetapi sebagai ideologi yang disesuaikan secara historis dan budaya dengan konteks nasional. Marhaenisme menegaskan bahwa sosialisme di Indonesia harus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi rakyat kecil dan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan serta gotong royong, yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila.

Menurut Notonagoro (1980), sila keadilan sosial dalam Pancasila merupakan manifestasi nilai sosialisme Indonesia yang mengandung cita-cita kemanusiaan, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Sosialisme Indonesia ini mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, yang membedakannya dari sosialisme Barat yang cenderung materialistis dan revolusioner. Penjelasan ini memperkuat pemahaman bahwa sosialisme di Indonesia bukan hanya soal redistribusi kekayaan, tetapi juga tentang pembangunan masyarakat yang harmonis dan inklusif, di mana negara memiliki peran aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya dan sosial yang sudah ada. Studi kasus PSI, Parsi, dan Paras menunjukkan bahwa meskipun sosialisme demokrat memiliki landasan filosofis dan nilai-nilai yang kuat, implementasinya dalam sistem demokrasi Indonesia menghadapi kendala budaya dan politik yang signifikan. Sukri (2021) mengemukakan bahwa PSI gagal memperoleh dukungan massa yang luas karena kurangnya basis budaya dan agama serta bahasa politik yang tidak membumi di kalangan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan ideologi politik di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan konteks sosial budaya masyarakat. Sosialisme yang terlalu intelektual dan kurang mengakar pada nilai-nilai lokal sulit diterima oleh masyarakat yang mayoritas religius dan memiliki identitas budaya yang kuat. Oleh karena itu, sosialisme di Indonesia harus terus menerus dikontekstualisasikan agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

Tekanan globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang mengedepankan pasar bebas serta dominasi oligarki menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana

diamanatkan oleh sosialisme dan Pancasila (Samosir, 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun sosialisme secara normatif menjadi bagian dari ideologi bangsa, realisasinya dalam kebijakan publik masih sangat terbatas. Hal baru yang dapat ditarik dari kajian ini adalah bahwa tantangan kontemporer sosialisme di Indonesia bukan hanya soal ideologi atau budaya, tetapi juga soal struktur ekonomi-politik yang menghambat redistribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan. Dominasi oligarki dan kebijakan liberalisasi pasar mengikis peran negara sebagai pengatur ekonomi yang adil, sehingga nilai-nilai sosialisme sulit diwujudkan secara nyata.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisme di Indonesia tidak hadir sebagai sistem revolusioner dan dogmatis sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan berkembang melalui proses hibridisasi dalam bingkai Demokrasi Pancasila yang menekankan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kekeluargaan. Temuan menunjukkan bahwa sosialisme Indonesia lebih berfungsi sebagai landasan moral dan arah etis dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Meskipun konsep "Sosialisme Indonesia" sempat menjadi narasi dominan pada era Soekarno dan diperjuangkan oleh PSI, perkembangannya terhambat oleh stigma pasca-1965 yang mengaitkan sosialisme dengan komunisme, menyebabkan ideologi ini lebih sering dimaknai secara simbolik ketimbang menjadi landasan konkret dalam kebijakan negara. Dalam konteks teori, hasil studi ini menegaskan pentingnya kerangka hibridisasi ideologi dan Demokrasi Pancasila sebagai dasar analisis yang menunjukkan bahwa nilai-nilai sosialisme mengalami adaptasi kultural yang khas Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya revitalisasi ideologi sosialisme melalui penguatan kesadaran politik rakyat, rekontekstualisasi nilai budaya lokal, serta reformasi struktural terhadap dominasi oligarki dan liberalisasi pasar yang menghambat tercapainya keadilan sosial. Implikasinya, sosialisme Indonesia harus dilihat sebagai ideologi dinamis yang mampu bersinergi dengan demokrasi jika diarahkan melalui pendekatan kebijakan yang progresif dan berbasis nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengkajian MPR RI. (2018). *Kajian akademik: Penegasan demokrasi Pancasila* (Cet. 1). Badan Pengkajian MPR RI. https://perpustakaan.setjen.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=4013 ISBN: 978-602-5676-36-9

Cahyo, S. D. (2016). Ideologi sosialisme Indonesia perspektif Partai Rakyat Demokratik (PRD). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *10*(2), 123–140.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). *Global transformations: Politics, economics and culture*. Stanford University Press. ISBN: 9780804736275

Hendriwani, S. (2020). Teori kelas sosial dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, *2*(1), 13–28. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma

Hilal, I., Anantama, M. D., & Munaris. (2023). *Poskolonial: Hibriditas (teori dan praktik)* (Cet. 1). Selat Media Partners. ISBN: 978-623-09-2819-2

Khalik, T. (2013). Perkembangan sosialisme di dunia dan sosialisme Indonesia. *Jurnal Kajian Politik*, *8*(1), 45–60.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Munigar, M. M. R. (n.d.). Membangun sosialisme Indonesia: Pemikiran dan keikutsertaan Sutan Sjahrir dalam politik Indonesia (1945–1960). *Kronik: Journal of History Education and*

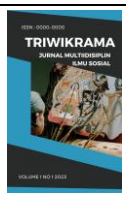

Historiography, Universitas Negeri Surabaya. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jhi/article/download/37163/12677

Notonagoro. (1980). Keadilan sosial dalam Pancasila sebagai perwujudan sosialisme Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, *2*(1), 15–29.

Pramasanti, R., Utama, T. C., & Setiyono, B. (n.d.). Pemikiran politik Sutan Sjahrir tentang sosialisme: Sebuah analisis psikologi politik. *e-Journal Undip*. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/1650/1643

Samosir, R. (2021). Tantangan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, *15*(3), 201–218.

Steger, M. B. (2003). *Globalization: A very short introduction*. Oxford University Press. ISBN: 9780192803597

Sukri. (2021). Dinamika sosialisme dan politik budaya di Indonesia. *Jurnal Studi Politik*, *12*(3), 201–220.

Sukri, M. A. (2021). Sosialis demokrat dalam praktik di Indonesia. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, *17*(1), 40–51. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/8359

Wiratama, N. S., Budianto, A., & Afandi, Z. (2021). Perkembangan sosialisme di dunia abad ke-19 serta pengaruhnya di Indonesia. *Danadyaksa Historica*, *1*(2), 128–140.

Wiratama, N. S., Budianto, A., & Afandi, Z. (n.d.). Perkembangan sosialisme di dunia abad ke-19 serta pengaruhnya di Indonesia. *Jurnal Didaktika FKIP UM Palembang*. https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/article/view/4247